



BAB 14

Tantangan Koperasi Nelayan sebagai Penyeimbang Rezim Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Muhammad Helmi Falah, Fety Widiанти Aptasari

A. Kondisi Ekonomi Nelayan Kecil dan Urgensi Mendirikan Koperasi Nelayan

Potensi ekonomi dari sumber daya kelautan Indonesia dapat mencapai US\$1,3 triliun per tahun (Pebrianto, 2020). Namun, nilai tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut tergambar dari rendahnya kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang hanya mencapai 2,65% pada 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan Indonesia.

M.H. Falah* & F.W. Aptasari

*Universitas Mataram, *e-mail*: helmifallah@gmail.com

© 2023 Editor & Penulis

Falah, M. H., & Aptasari, F. W. (2023). Tantangan koperasi nelayan sebagai penyeimbang rezim pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Dalam K. Amri, H. Latuconsina, & R. Triyanti (Ed.), *Pengelolaan sumber daya perikanan laut berkelanjutan* (507–548). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.908.c765 E-ISBN: 978-623-8372-50-8

Permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan tidak hanya pada rendahnya kontribusinya terhadap PDB Indonesia, tetapi juga pada rendahnya kesejahteraan nelayan Indonesia. Setidaknya 20% hingga 48% nelayan di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (Pryanka, 2018). Dari kondisi itulah, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir identik dengan masyarakat miskin (Silooy, 2017; Wasiaturrahma et al., 2020). Bahkan, menurut Sari et al. (2020), masyarakat nelayan Indonesia merupakan kelompok termiskin dari kelompok termiskin.

Berdasarkan kondisi tersebut, umumnya nelayan memiliki pekerjaan sampingan, seperti menjadi buruh dan berdagang dikarenakan rendahnya pendapatan menjadi nelayan (Nainggolan et al., 2021). Pekerjaan sampingan yang nelayan lakukan tersebut dilakukan pada saat musim paceklik yang mengakibatkan mereka tidak mampu melaut. Namun, kontribusi pendapatan dari pekerjaan sampingan tersebut pun tidak sampai setengah dari pendapatan utamanya sebagai nelayan sehingga belum dapat menjadikan mereka sejahtera (Pangidunan et al., 2023). Hal tersebut dikarenakan pekerjaan sampingan nelayan merupakan pekerjaan rendah keterampilan sehingga tingkat produktivitas ekonomi juga rendah (Arbarini et al., 2018).

Buruknya tingkat ekonomi nelayan kecil menjadikan mereka banyak yang memutuskan untuk bermigrasi dari pesisir ke kota (Yuniarti, 2021). Oleh karena itu, jumlah nelayan di Indonesia terus mengalami penurunan (Warren & Steenbergen, 2021). Jumlah nelayan pada tahun 2012 sebanyak 4,5 juta jiwa, tetapi pada tahun 2020 jumlah tersebut berkurang lebih dari setengahnya dan menyisakan 2,2 juta jiwa (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2023). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan buruknya tingkat ekonomi nelayan sehingga jumlah nelayan berkurang adalah (1) pencemaran lautan sehingga memengaruhi kuantitas ikan yang tersedia, (2) privatisasi wilayah pesisir seperti reklamasi pantai dan industri pariwisata, (3) makin tingginya biaya melaut dan tidak sebanding dengan modal yang dimiliki, serta (4) krisis iklim (Pitakasari, 2011).

Selain keempat faktor tersebut, terdapat juga faktor tambahan yang memberatkan nelayan, yaitu kebijakan (Ermawati & Zuliyati, 2015; Fernanto et al., 2022; Fitriani et al., 2023). Salah satu dari kebijakan terbaru yang dinilai memberatkan nelayan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Pada dasarnya kebijakan penangkapan ikan terukur bertujuan untuk mempertahankan ekologi dan menjaga biodiversitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan nelayan. Kebijakan penangkapan ikan terukur diharapkan dapat menghapus praktik kegiatan perikanan yang melanggar hukum (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*), dan tidak diatur (*unregulated fishing*).

Kebijakan tersebut merupakan pergeseran pengelolaan penangkapan ikan di laut Indonesia dari kebijakan kontrol *input* menjadi kontrol *output*. Kebijakan kontrol *output* merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip *blue recovery* di laut yang ditujukan menjaga agar tidak terjadi *overfishing* (Cabral et al., 2018). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memulihkan potensi stok ikan serta mengatasi dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat nelayan akibat dari kebijakan sebelumnya, yakni kontrol input sehingga tercipta sumber daya kelautan berkelanjutan di Indonesia (Northrop et al., 2020).

Kebijakan kontrol *output* di Indonesia diterapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota dengan sistem kontrak dalam jangka waktu tertentu (Zaini, 2021). Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah izin penangkapan ikan diberikan kepada armada dan alat tangkap; kedua didasarkan pada kuota ikan yang ditangkap (Zulham et al., 2022).

Dalam ranah teknis, kuota volume ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap di seluruh zona penangkapan ikan terukur ditentukan berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian

Stok Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi tersebut melingkupi kuota dan zona penangkapan ikan untuk perusahaan perikanan, investor, kegiatan penangkapan ikan untuk kegiatan non-komersial, hingga nelayan kecil (Zaini, 2021).

Pada level nelayan kecil, kebijakan pengelolaan ikan yang baru tersebut dinilai memberi efek negatif bagi nelayan berupa pertarungan bebas antara korporasi besar dan nelayan kecil (Handayani, 2023; Tubaka, 2022; Utami, 2022). Pertarungan bebas tersebut berpotensi menambah permasalahan sosial-ekonomi nelayan kecil dikarenakan ketidakmampuan mereka bersaing dengan korporasi besar.

Di tengah dukungan dan kritik terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan yang baru tersebut, terdapat satu dampak turunan yang pasti mengikat nelayan kecil. Dampak turunan tersebut adalah pengorganisasian nelayan kecil. Kebijakan tersebut mensyaratkan nelayan kecil yang menangkap ikan di perairan lebih dari 12 mil laut membentuk aksi kolektif dengan bergabung dalam koperasi, asosiasi, atau korporasi.

Oleh karena itu, bab ini berfokus mengulas tantangan yang dihadapi koperasi nelayan menggunakan pendekatan metode etnografi. Metode etnografi ini memaparkan uraian mendalam tentang budaya sebuah komunitas yang menjadi objek penelitian (Satori & Komariah, 2011). Penelitian etnografi mengamati dan menganalisis budaya secara holistik, baik spiritual maupun material. Pemilihan metode etnografi dikarenakan permasalahan nelayan bersifat multidimensi sehingga harus dipandang secara menyeluruh (Suryadi & Sufi, 2019).

Analisis secara holistik ini dilakukan karena budaya berkaitan antara satu dan yang lainnya hingga membentuk perilaku individu dan kolektif. Etnografi merupakan rancangan yang tepat untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi peluang dan tantangan pendirian koperasi nelayan dikarenakan sifat alamiah dari pendekatan tersebut (Denzin & Lincoln, 2000). Selain itu, etnograf diperlukan untuk meninjau karakteristik masyarakat pesisir yang jauh berbeda

dengan karakteristik masyarakat baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan (Kusnadi, 2015).

B. Koperasi dan Keterbatasan Modal Nelayan

Di balik keharusan nelayan kecil untuk membentuk sebuah aksi kolektif sebagai syarat untuk dapat menangkap ikan di perairan lebih dari 12 mil laut, koperasi memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu manfaat koperasi adalah menjadi media nelayan memperoleh akses pembiayaan yang tidak memberatkan. Koperasi dapat mengatasi permasalahan klasik nelayan kecil, yaitu kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan rendahnya modal kerja nelayan, yang salah satunya adalah pemberian modal melalui program kredit usaha rakyat (KUR). KUR ini diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) pada sektor usaha produktif yang operasionalnya layak (*feasible*), tetapi tidak memenuhi kebutuhan perbankan (Sumantika & Ardiyanto, 2018). Namun, di lapangan, nelayan masih kesulitan mendapatkan bantuan permodalan KUR.

Bank penyalur KUR tidak dapat menerima penjaminan kredit yang dipersyaratkan oleh nelayan. Pemberian kredit ke sektor perikanan tangkap dipandang berisiko tinggi oleh lembaga keuangan. Lembaga perbankan pada umumnya kurang tertarik untuk memberikan kredit kepada nelayan karena diasumsikan nelayan tidak akan mampu mengembalikan kredit yang diterimanya secara teratur padahal bank membutuhkan kepastian pembayaran angsuran kredit (Masyhuri, 2017; Valentina, 2018).

Karena ketidakmampuan nelayan kecil dalam mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan formal seperti bank, umumnya nelayan kecil terjerat dalam ikatan patron-klien. Patron-klien berkembang dalam bentuk pinjaman uang dan sejenisnya. Pinjaman tersebut bersifat mengikat melalui pola bagi hasil pendapatan dari penjualan ikan hasil tangkapan dengan pemilik modal (Lubis et al.,

2012). Hubungan patron-klien tersebut menjadi akar permasalahan kemiskinan nelayan (Pinem et al., 2019). Di beberapa tempat, patron-klien ini dikenal dengan nama juragan, langgan, atau tengkulak.

Popkin (1979) menyatakan, pola hubungan patron-klien merupakan tindakan monopoli dan eksploitasi karena patron menghalangi kliennya berhubungan dengan pasar. Scott (1972) mengatakan bahwa hubungan patron-klien ini dicirikan dengan, 1) adanya kepemilikan sumber daya ekonomi yang tidak seimbang, 2) adanya hubungan resiprositas yaitu hubungan saling memberi dan menerima walaupun dalam kadar yang tidak seimbang, dan 3) hubungan loyalitas dikarenakan ketidakmampuan nelayan kecil untuk memperoleh permodalan alternatif. Karena itu, hubungan patron-klien menjadi faktor utama kemiskinan struktural nelayan kecil (Adawiyah et al., 2021).

Keterbatasan modal nelayan memberikan efek struktural yang banyak dan luas. Salah satu dampak tersebut adalah buruknya kesehatan nelayan dan keluarganya, seperti gizi buruk, kelaparan, kekurangan energi kronis, dan morbiditas yang berujung pada kemiskinan laten. Hal tersebut menjadi salah satu contoh mata rantai kemiskinan nelayan.

Minimnya kepemilikan modal juga menjadikan nelayan tidak cukup mampu untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki (Retnowati et al., 2014). Kompetensi rendah yang dimiliki nelayan tersebut mulai dari rendahnya kemampuan merencanakan usaha, rendahnya kesadaran akan keselamatan saat melaut, hingga minimnya keterampilan lain selain melaut (Muflikhati et al., 2009). Oleh karena itu, koperasi dapat menjadi media dalam meningkatkan keterampilan nelayan, pembuatan pekerjaan, dan usaha alternatif bagi masyarakat pesisir (Ferine et al., 2017; Sirojuzilam & Muda, 2017). Program peningkatan keterampilan yang dilakukan secara mandiri oleh nelayan tidak akan memberatkan mereka dikarenakan dilakukan secara gotong-royong.

Dengan adanya koperasi, permasalahan modal tersebut perlahan dapat tertangani. Koperasi dapat menjalankan simpan pinjam

untuk pendanaan perseorangan dan pengadaan sarana yang dapat digunakan secara kolektif. Koperasi dapat membantu permodalan kepada kelompok-kelompok nelayan untuk mengadakan kapal yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka.

C. Koperasi dan Krisis Iklim

Selain keterbatasan modal dan rendahnya keterampilan, nelayan juga dihadapi oleh tantangan lain berupa krisis iklim. Krisis iklim tidak hanya menjadikan nelayan kesulitan dalam melaut, tetapi juga mengurai kuantitas ikan. Peningkatan senyawa hidrogen berakibat pada penurunan tingkat keasaman air laut. Bertambahnya kadar karbon dioksida dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Lapisan ozon berfungsi sebagai lapisan absorpsi gelombang pendek radiasi matahari. Hal ini berujung pada penyinaran radiasi matahari yang datang langsung menuju permukaan dan menyebabkan adanya peningkatan suhu permukaan air laut (Turkington et al., 2018). Kondisi perubahan suhu air laut mengakibatkan terjadi perpindahan ikan menuju ke arah kutub (daerah lebih dingin) atau ke tempat yang lebih dalam, yaitu tempat temperatur lingkungan tidak jauh berbeda terhadap temperatur optimal dari spesies ikan tersebut (Nye et al., 2009; Perry et al., 2005; Pinsky et al., 2013).

Berdasarkan laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2022, krisis iklim dilaporkan akan memperparah peningkatan suhu air laut dan memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis ke subtropis sehingga mengurangi pendapatan Indonesia dari penangkapan ikan sebesar 24%. Perubahan iklim dan pengasaman laut meningkat cepat yang melingkupi penangkapan berlebihan, masuknya spesies baru dalam perairan, degradasi lingkungan, kelebihan nutrisi dalam perairan, dan polusi.

Pada 2019 telah terjadi peningkatan curah hujan kurang lebih 2,5 mm/hari, peningkatan tinggi gelombang ekstrem lebih dari 1,5 meter, peningkatan suhu 0,45°C–0,75°C, dan permukaan laut yang meningkat dari 0,8–1,2 cm/tahun. Atas kondisi tersebut, sektor

kelautan dan pesisir terdampak berbagai hal merugikan seperti perubahan suplai sedimen sehingga mengurangi daya jelajah kapal nelayan kecil yang berbobot < 20GT dan membahayakan keselamatan pelayaran (Kementerian PPN/Bappenas, 2019).

Kajian Ocean Health Index (OHI) pada tahun 2020 menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-137 dari 221 negara berdasarkan tingkat kesehatan lautnya dengan skor 65 dari skala 100. Skor tersebut berada cukup jauh di bawah rata-rata dunia, yaitu 71. Berdasarkan kajian yang sama, kondisi lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 (Clawson & Frazier, 2020). Skor yang rendah tersebut sangat memperihatinkan apabila dibandingkan dengan potensi pendapatan negara dari sumber daya kelautan Indonesia.

Nelayan belum dapat menghadapi krisis iklim tersebut dengan baik dikarenakan permasalahan mendasar yang dialami, yakni minimnya modal. Pada negara maju, perubahan iklim tersebut disiasati dengan penyesuaian alat tangkap dan alat penyimpanan hasil tangkapan. Alat penyimpanan hasil tangkapan penting dimiliki mengingat musim-musim sulit melaut. Selain itu, alat penyimpanan juga bermanfaat untuk memberikan daya tawar nelayan kecil kepada pengepul ikan yang sering memonopoli harga tangkapan. Melalui koperasi nelayan dapat menghadapi krisis iklim dengan lebih baik melalui pengadaan alat penangkapan kolektif dan alat penyimpanan hasil tangkapan yang sesuai.

D. Koperasi, *Blue Economy*, Teknologi Tepat Guna, dan Efek Pengganda

Selain dapat menangani permasalahan keterbatasan modal, meningkatkan keterampilan nelayan dan menjadi solusi nelayan dalam menghadapi krisis iklim, koperasi juga berperan dalam mewujudkan *blue economy*. Prinsip *blue economy* ditujukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dengan menjamin kelestarian sumber daya. *Blue economy* terdiri dari tiga pilar

utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Blue economy* bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional (Pauli, 2010). *Blue economy* pada dasarnya menekankan pada inovasi dan kreativitas untuk mengolah bahan baku menjadi produk tanpa menyisakan limbah (*zero-waste*).

Untuk menghasilkan *output* yang sama, usaha dengan teknologi tradisional memerlukan *input* yang jauh lebih besar daripada usaha dengan teknologi maju sehingga teknologi tradisional akan menghasilkan limbah yang sangat besar (Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia [DKP RI], 2006). Koperasi dapat memberi posisi tawar nelayan kecil untuk mengurangi limbah dari usaha yang dihasilkan dengan menggunakan aset kolektif (Rivera et al., 2017).

Selain pemanfaatan teknologi, untuk mencapai *blue economy* adalah dengan budaya melaut nelayan yang baik. Dengan banyaknya nelayan kecil di Indonesia, nelayan kecil menjadi aktor utama dalam menyukseskan *blue economy*. Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dalam Outlook KNTI 2023, nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional di Indonesia memiliki kontribusi mencapai 80% dari total produk perikanan (KNTI, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir adalah rendahnya tingkat pengetahuan nelayan tentang pentingnya menjaga lingkungan (Primyastanto et al., 2010). Berdasarkan hal tersebut, pengedukasian masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, koperasi dapat berperan dalam peningkatan pengetahuan, pengadaan alat tangkap kolektif, hingga pengadaan teknologi pengolahan hasil tangkapan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Selain permasalahan utama berupa rendahnya modal, nelayan juga memiliki permasalahan untuk mencapai kesejahteraan berupa buruknya lingkungan sosial (Acheson, 1981). Permasalahan lingkungan sosial tersebut memengaruhi baik keputusan individu, rumah tangga, maupun kolektif. Banyak dari nelayan kecil yang enggan membentuk koperasi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung [DKP Babel], 2018). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji tingkat penerimaan dan peluang pendirian koperasi nelayan.

Nilai tersebut digali pada desa-desa nelayan. Hal tersebut dikarenakan secara umum desa-desa tersebut memiliki sumber daya ekonomi berupa dana desa untuk mewujudkan konsep tersebut. Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat besarnya jumlah nelayan dan kontribusinya bagi perekonomian. Jumlah nelayan kecil di Indonesia pada tahun 2022 adalah 2,22 juta jiwa atau sekitar 90% dari total armada perikanan (KKP, 2022).

E. Tantangan Pendirian Koperasi Nelayan: Tinjauan Etnografi

Ada beberapa aspek kehidupan yang menjadi indikator tantangan dalam proses pendirian koperasi nelayan, di antaranya tingkat pendidikan, minat usaha dan perilaku ekonomi, masalah keluarga, suku dan budaya, strata sosial, dan jumlah populasi nelayan.

1. Pendidikan Nelayan

Dalam pendirian dan pengelolaan koperasi yang maksimal, diperlukan pengetahuan pengelolaan keuangan yang memadai, kesadaran akan semangat gotong royong bagi pengurus dan anggota. Pengetahuan pengelolaan keuangan tersebut meliputi pengetahuan perencanaan keuangan, pengetahuan pengeluaran-pemasukan, pengetahuan uang dan aset, serta masih banyak lagi. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal, kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik meskipun didukung oleh sarana, prasarana, bahkan sumber dana yang berlebihan (Taremwa & Lopoyetum, 2015).

Dalam konteks koperasi nelayan, informan X menjelaskan rendahnya pendidikan dan pengetahuan nelayan tentang pengelolaan keuangan merupakan tantangan utama pendirian koperasi, sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut.

“Desa-desanya nelayan Kabupaten X membangun usaha dari dana desanya serupa dengan mayoritas desa lain, yakni usaha yang berwujud fisik seperti usaha ritail, menyewakan ruko, dan sejenisnya. Walau kadang usaha-usaha tersebut tidak sesuai dengan potensi dari desa tersebut. Bahkan sering kali usaha tersebut menjadi bahan konflik. Hal tersebut dikarenakan preferensi masyarakat dan kepala desa. Preferensi tersebut akibat dari rendahnya pendidikan sehingga tidak cukup mampu untuk menciptakan program pemberdayaan berkelanjutan.”

Pernyataan tersebut serupa dengan hasil penelitian Imron (2011) yang menjelaskan bahwa, selain miskin, nelayan juga dinilai sebagai masyarakat tidak pintar, tidak efisien dalam bekerja, lemah, hingga tidak mampu merencanakan masa depannya. Hal tersebut menggambarkan bahwa buruknya kondisi nelayan tidak jauh berubah dari beberapa dekade lalu. Salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat pendidikan nelayan. Temuan tersebut menjadi penegas pernyataan Menteri Desa PTT Abdul Halim bahwa banyak usaha milik desa yang menjadi potensi konflik karena jenisnya bertentangan dengan potensi desa, bahkan mata pencaharian beberapa warga desa, seperti usaha toko klontong (Media Indonesia, 2022). Informan X menjelaskan,

“Bahwa rendahnya pendidikan tersebut berdampak pada kapasitas dalam pengelolaan usaha. Usaha seperti koperasi simpan pinjam merupakan unit usaha dengan tingkat kesulitan pengelolaan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kemampuan yang harus dikuasai mulai dari keuangan, pendekatan personal, *menejemen* SDM, *menejemen* risiko dan lain sebagainya”.

Temuan tersebut didukung data dari Direktorat Sekolah Dasar (DITPSD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang menunjukkan 80% nelayan kecil hanya mengenyam pendidikan di bawah tingkat SMP (Doaly, 2023). Keluarga dengan ekonomi rendah ditambah rendahnya pendidikan yang dimiliki, akan menjadikannya

kesulitan dalam membuat perencanaan keuangan (Yohnson, 2004). Selain itu, informan X juga menjelaskan,

“Rendahnya pendidikan dan ekonomi berpotensi menyebabkan penyimpangan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola”.

2. Preferensi Usaha dan Perilaku Ekonomi Individu

Tantangan lain dalam pembentukan koperasi nelayan adalah perilaku ekonomi nelayan seperti yang dijelaskan informan X berikut.

“Dalam interaksi ekonomi sosial, nelayan lebih suka melakukan kegiatan usaha secara perseorangan dengan keluarga inti mereka dibanding dengan membentuk usaha secara kolektif.”

Pendapatan nelayan yang relatif rendah membuat nelayan tidak bisa bergantung dari pekerjaan di sektor kelautan (Damayanti, 2018). Dalam ekonomi keluarga, istri nelayan juga berperan dalam mencari nafkah. Hal tersebut serupa dengan penelitian Kurniawati (2017) yang menyatakan bahwa peran istri dalam perekonomian rumah tangga perikanan cukup besar. Salah satu bentuk strategi adaptasi yang dilakukan oleh nelayan untuk mengatasi kesulitan ekonomi seperti pada saat pandemi adalah mendorong istri mereka untuk ikut mencari nafkah (Helmi & Satria, 2012). Melanjutkan topik preferensi usaha, informan X menjelaskan bahwa,

“Istri nelayan tidak hanya memiliki peran sebagai pihak yang membantu mencari nafkah keluarga. Mereka juga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga mereka. Jika dirunut besarnya peran dalam pengambilan keputusan itu karena mereka sering kali menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, terutama di musim sulit melaut”

Istri yang awalnya hanya bekerja di sektor domestik (mengurus rumah tangga dan merawat anak) harus membantu suami bekerja di sektor publik. Temuan tersebut serupa dengan penelitian Sabarisman

(2017) yang menjelaskan kuatnya peran istri nelayan, baik dalam aktivitas ekonomi maupun pengambilan keputusan. Hal tersebut merupakan salah satu ciri sosial nelayan yang menjadikannya berbeda dengan kelompok ekonomi lemah lainnya. Dengan demikian, pihak yang terbebani serta bertanggung jawab lebih dalam menanggulangi kerentanan ekonomi serta melindungi kelangsungan hidup rumah tangga adalah perempuan (Kusnadi, 2015).

Selanjutnya, menyambung topik perilaku ekonomi, informan X menyampaikan,

“Faktor nelayan lebih memilih usaha dengan tingkat kepastian yang tinggi adalah karena nelayan kecil selama ini tidak mendapatkan kepastian pendapatan dari kegiatan melaut. Usaha selain melaut tersebut seperti berjualan makanan dan minuman di pinggir pantai, menjual BBM eceran.”

Hal tersebut serupa dengan penelitian (Acheson, 1981; Nadjib, 2013) yang menjelaskan bahwa nelayan tidak pernah memiliki gambaran tentang pendapatan yang akan diperolehnya. Bagi nelayan, hasil usaha penangkapan ikan sangat fluktuatif dan spekulatif. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik kehidupan berbeda karena pola kehidupan di laut yang sangat berisiko dan tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain (Rahim et al., 2018). Menghadapi kondisi seperti ini, nelayan memiliki kecenderungan mengembangkan pola adaptasi yang khas, tidak umum, dan sering tidak dipahami oleh masyarakat di luar komunitas nelayan (Imron, 2011; Nadjib, 2013).

Informasi tentang dampak turunan dari pendidikan selain preferensi usaha adalah perilaku ekonomi nelayan seperti yang dijelaskan informan X sebagai berikut:

“Terkait konteks budaya, kendati secara personal nelayan memiliki etos kerja tinggi namun dilain sisi cenderung boros. Etos kerja yang tinggi itu tercermin dari kegiatan melaut dan usaha sampingan yang dilakukan keluarga nelayan kecil.”

Temuan tersebut serupa dengan temuan Nadjib (2013), yaitu bahwa mayoritas nelayan adalah kelompok masyarakat yang paling miskin meskipun rata-rata mereka memiliki etos kerja tinggi. Hal tersebut dikarenakan sifat dan karakter nelayan yang konsumtif dan sering berfoya-foya. Sikap boros dan foya-foya tersebut menjadi salah satu faktor utama dari kesukaran usaha kolektif untuk berhasil. Selain itu, hasil tersebut mendukung penelitian Suhartanti (2022) yang menjelaskan bahwa alasan nelayan mempertahankan gaya hidup konsumtif adalah karena gengsi. Rasa gengsi tersebut lebih besar pada nelayan juragan karena rasa iri dengan juragan lainnya. Gengsi tersebut menciptakan struktur sosial yang khas.

Tingginya kapasitas ketua Forum Kepala Desa dalam memetakan masalah masyarakat dan pandangan pembangunan berkelanjutan terlihat dalam penjelasannya,

“Jika nelayan kecil hanya mengandalkan usaha jualan makanan minuman ringan dan terjadi pembiaran eksploitasi alam untuk kepentingan wisata bahari secara berlebihan maka tidak akan tercapai pembangunan berkelanjutan”.

Pernyataan tersebut mendukung penelitian Denia et al. (2018) dan Nawawi (2013) yang menerangkan bahwa banyak masyarakat pesisir yang justru harus menerima dan menanggung dampak negatif dari turisme massal yang bergantung pada wisata bahari.

3. Konflik Keluarga

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, akibat rendahnya hasil tangkapan, istri nelayan juga, mencari nafkah. Kondisi demikian menjadikan istri telah memiliki proporsi peran yang sama dengan suami dalam kegiatan produksi atau bahkan lebih dominan. Kendati hal tersebut menjadikan tidak adanya lagi sistem patriaki, bukan berarti selalu baik karena menimbulkan ketidaksetaraan. Kondisi tersebut juga dijelaskan oleh informan X,

“Kemiskinan ini seperti mata rantai. Karena akses pengelolaan sumber daya sangat terbatas maka nelayan menjadi miskin. Karena miskin istri-istri nelayan ikut mencari nafkah. Kadang penghasilannya bisa lebih dari suami. Itu yang buat konflik di rumah tangga mereka. Itu yang buat tidak kondusif. Dari kondisi tidak kondusif tersebut membuat perilaku ekonomi mereka tidak baik. Begitu seterusnya”.

Ketidaksetaraan ini dapat dilihat dari dominasi keduanya dalam pengambilan keputusan, bahkan menurut Purwoko et al. (2011), tidak jarang kondisi ini menyebabkan kekerasan rumah tangga. Ketidaksetaraan tersebut tidak hanya membentuk budaya yang tidak kondusif di internal rumah tangga nelayan, tetapi juga pada pola interaksi sosial secara umum. Dalam konteks pembentukan aksi kolektif, konflik domestik rumah tangga tersebut dapat menjalar kepada pengelolaan aksi kolektif. Secara umum, hal tersebut menyebabkan masyarakat pesisir memiliki karakter yang tegas, keras, dan terbuka (Sabian, 2007).

Pola hidup nelayan yang tergantung dengan alam menjadikannya masyarakat dengan sifatnya yang keras (Bengen, 2001). Penelitian ini menambah pandangan tentang kerasnya perwatakan nelayan. Kerasnya perwatakan nelayan tidak hanya didasari oleh ketergantungan dengan alam, tetapi juga penggabungan antara perebutan akses sumber daya ekonomi yang menyebabkan harus keras. Selain itu, temuan ini juga memperkuat penelitian Sabarisman (2017) yang menjelaskan salah satu peran teknis yang menghambat kesejahteraan nelayan adalah pola penangkapan yang sangat tradisional dan diperkuat oleh karakteristik sosial budaya yang tidak kondusif.

4. Suku dan Budaya

Dalam aspek budaya dan suku, informan X menjelaskan bahwa,

“Rendahnya pendidikan diperkuat oleh perbedaan suku yang meningkatkan potensi konflik horizontal antar nelayan. Perbedaan

suku pada banyak desa nelayan menjadi faktor terjadinya konflik. Banyak desa nelayan yang terdapat lebih dari 1 (satu) suku. Suku lainnya tersebut adalah nelayan yang bermigrasi dari wilayahnya. Perbedaan suku tersebut juga membawa perbedaan pola pikir, kebiasaan, pola komunikasi”.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa masyarakat dengan tingkatan paling plural di dunia nomor empat adalah Indonesia (Ashmarita, 2020). Struktur masyarakat pesisir yang sangat plural membentuk sebuah sistem dan nilai budaya dari akulturasi budaya masing-masing komponen masyarakat (Yusnita et al., 2015). Tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia merupakan lokus klasik bagi bentukan masyarakat majemuk. Masyarakat yang menjemuk tersebut menciptakan heterogenitas yang artinya masing-masing sub-kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang sangat berbeda satu dari yang lainnya (Kusumohamidjojo, 2000).

Temuan potensi konflik sosial tersebut serupa dengan penelitian (Charles, 1992) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuh tipologi konflik adalah konflik primordial (perasaan kesukuan yang berlebihan). Secara lengkap, tujuh tipologi konflik berdasarkan faktor penyebabnya adalah

- 1) konflik pengelolaan sumber daya,
- 2) konflik kepemilikan sumber daya,
- 3) konflik kelas,
- 4) konflik lingkungan,
- 5) konflik cara produksi,
- 6) konflik primordial, dan
- 7) konflik usaha.

Keberagaman status sosial dan pluralisme budaya tersebut juga berdampak terhadap pola pembiayaan nelayan kepada lembaga keuangan. Beragamnya kebutuhan yang dimiliki para nelayan, baik nelayan buruh, nelayan kecil, hingga nelayan juragan, menjadikan

nelayan tidak melakukan pengajuan pembiayaan secara kolektif, tetapi cenderung individualistis (Ramadhan et al., 2022).

Hubungan antara sifat individualistis nelayan dan potensi konflik juga dijelaskan oleh Zulfa & Susanti (2023) bahwa dalam hal pekerjaan, sifat individu nelayan lebih dominan. Nelayan berusaha masing-masing tanpa saling bantu dan mereka percaya bahwa hasil kerja tergantung pada usaha dan kekuatannya sendiri. Selain itu, adanya sikap individualisme tersebut dianggap dapat meminimalisasi konflik yang terjadi antarnelayan.

Pergeseran budaya tersebut telah dinilai dan dijelaskan lebih dari dua dekade lalu. Satria (2001) berpendapat bahwa secara sosial-budaya, masyarakat pesisir awalnya dibangun atas paduan antara budaya kelautan, pantai, dan berorientasi pasar. Namun, tradisi ini berubah menjadi budaya dan sikap hidup yang inklusivistik, kosmopolitan, *outward looking*, egaliter, *entrepreneurship*, dinamis, dan pluralistis.

Untuk itu, secara umum struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh heterogenitas etnik dan keunikan, unik karena diwarnai pluralitas nilai-nilai budaya lokal yang majemuk. Secara horizontal, kondisi tersebut ditandai kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan-lapisan atas dan lapisan bawah (Rosita, 2021).

5. Penokohan dan Strata Sosial Masyarakat

Faktor lainnya dalam memengaruhi pola interaksi antar masyarakat adalah strata sosial di masyarakat. Satria (2002) membagi stratifikasi sosial menjadi tiga jenis, yaitu

- 1) stratifikasi karena perbedaan status politik, seperti perbedaan gelar kehormatan, kedudukan, dan jabatan;
- 2) stratifikasi karena perbedaan status pekerjaan; dan

- 3) stratifikasi karena status ekonomi. Pola interaksi berdasarkan strata sosial tersebut diungkapkan oleh informan X,

“Strata sosial di Provinsi A sangatlah kuat. Hal tersebut memengaruhi pola interaksi dari masyarakat. Terdapat penokohan yang kental di masyarakat. Karena penokohan yang kental tersebut menjadikan pejabat pemerintahan supra desa jauh lebih didengar dibandingkan pemerintah desa”

Pernyataan tersebut serupa dengan penelitian Rasmianto (2009) yang menjelaskan strata sosial yang sangat kuat dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, dari strata inilah muncul kelompok-kelompok yang dihargai, dihormati, dan disegani. Lebih terperinci lagi, informan X menjelaskan dasar dari penokohan tersebut.

“Penokohan terjadi dikarenakan pandangan nelayan kecil yang menganggap pemerintahan supradesa lebih tinggi stratanya. Strata sosial yang disematkan nelayan kepada pemerintah supra desa tidak hanya pada stratifikasi perbedaan status politik seperti jabatan namun juga pada kemampuan ekonomi pemerintah supra desa tersebut. Hal ini dikarenakan kemiskinan laten nelayan kecil”.

Dalam konteks pengembangan sosial, kondisi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah supradesa untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Penokohan tersebut juga terjadi pada tingkat internal desa. Penokohan nelayan pada internal desa sedikit berbeda dari penokohan masyarakat nelayan terhadap pemerintah supradesa. Perbedaan tersebut terletak pada hal yang mendasari penokohan. Pada internal desa, salah satu dasar penokohan adalah aset dan usia. Hal tersebut menjadi tantangan pembentukan koperasi nelayan seperti yang disampaikan oleh informan X,

“Hal tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dari pembentukan koperasi nelayan terintegrasi adalah penokohan

yang tidak berdasarkan dengan kapasitas analisis kelayakan usaha dan *menejerial* usaha.”

Temuan tersebut serupa dengan penelitian Suarjaya (2021) yang menjelaskan bahwa hanya beberapa masyarakat yang aktif dalam pengajuan gagasan pembangunan di desa biasanya. Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang dituakan karena faktor usia dan dianggap mampu mengajukan usulan tanpa mempertimbangkan kajian tertentu.

6. Berkurangnya Jumlah Nelayan

Seluruh tantangan yang dihadapi nelayan tersebut menjadikan kemiskinan nelayan adalah kemiskinan struktural. Hal tersebut dijelaskan oleh informan X pada sesi akhir wawancara bahwa,

“Jumlah nelayan menurun. Secara umum masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan adalah keturunan dari keluarga nelayan juga. Sangat jarang dijumpai masyarakat yang berprofesi nelayan kecil tidak dari keturunan nelayan. Keterbatasan modal ditambah rendahnya pendidikan dan perilaku ekonomi (boros) merupakan faktor-faktor utama dari kondisi tersebut”.

Temuan tersebut serupa dengan penelitian Andriati (2016) dan Manggopa et al. (2022) yang menjelaskan rendahnya minat keturunan nelayan untuk menekuni profesi yang serupa dengan orang tuanya. Penyebab utama dari rendahnya minat tersebut adalah rendahnya pendapatan yang diperoleh serta risiko keselamatan.

F. Rekeyasa Sosial Nelayan Melalui Pemberdayaan secara Formal dan Nonformal

Dari paparan sebelumnya, kemiskinan nelayan di Indonesia disebabkan permasalahan struktural dan juga kultural. Temuan tersebut memperkuat penelitian Suharto (2009) yang menjelaskan

bahwa kemiskinan masyarakat nelayan disebabkan oleh tiga hal, yaitu (1) kemiskinan kultural; (2) kemiskinan struktural; dan (3) kemiskinan super-struktural. Selain itu, temuan tersebut juga memperkuat penelitian dua dekade lalu (Rahardjo, 1999) yang menyatakan bahwa kemiskinan pada masyarakat pesisir merupakan kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural adalah kondisi tidak sejahtera yang dialami oleh masyarakat karena struktur sosial (Suyanto, 2013). Contoh penyebab kemiskinan struktural adalah seorang nelayan tidak memiliki alat tangkap yang memadai, sedangkan kemiskinan kultural adalah kondisi tidak sejahtera yang disebabkan kebiasaan, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Contoh dari kemiskinan kultural adalah boros, malas, lemahnya etos kerja, dan sebagainya. Hakim (2019) menjelaskan, kemiskinan kultural bagi nelayan kecil ditelusuri melalui sifat yang lazim disebut fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, dan sifat ketergantungan.

Sangat disadari bahwa permasalahan nelayan di Indonesia sangatlah kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah kondisi keuangan yang berdampak pada pola interaksi masyarakat. Kondisi keuangan tersebut besar dipengaruhi oleh pola pikir dan gaya hidup nelayan pada saat mendapat keuntungan besar. Modal sosial nelayan tersebut belum cukup mendukung prinsip-prinsip koperasi seperti nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, nelayan harus berdasarkan program pengembangan kapasitas masyarakat lewat pemberdayaan masyarakat yang melibatkan multisektor (Ratnawati & Sutopo, 2014).

Program pemberdayaan nelayan yang umumnya dilakukan pemerintah adalah bantuan alat tangkap. Program pemerintah ini belum maksimal dalam menggerakkan perubahan sosial dan struktur ekonomi masyarakat yang mengarah ke arah yang lebih produktif. Dukungan pemerintah berupa kebijakan ekonomi berkelanjutan diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Kadafak & Linke, 2021). Upaya pengentasan kemiskinan harus mengedepankan program-program yang berpihak dan memberdayakan masyarakat

melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Salah satu upaya dalam memutus mata rantai kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan rekayasa sosial.

Rekayasa sosial adalah perubahan sosial yang direncanakan untuk membentuk suatu kondisi sosial (Alimah et al., 2019). Pemerintah sebagai agen perubahan sosial yang direncanakan mengimplementasikannya dalam bentuk program pemerintah dan intervensi langsung. Pemerintah berkewajiban melakukan rekayasa sosial sebagai upaya penataan dan pembangunan, seperti penanaman pemahaman pengelolaan keuangan, budaya bahari, penyiapan berbagai infrastruktur penunjang, pelatihan, dan melakukan transmigrasi terencana agar tercipta perubahan sosial yang diharapkan (Kamim et al., 2018). Perubahan sosial adalah perubahan hubungan sosial, pola perilaku, kelembagaan, dan struktur sosial. Salah satu bentuk rekayasa sosial tersebut adalah pemberdayaan.

Terdapat tiga tahapan dalam proses pemberdayaan, yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayaan (Kamim et al., 2018). Lebih detail lagi Notoadmojo (2003) menjelaskan terdapat tiga proses pembentukan kesadaran, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Proses penyadaran masyarakat oleh pemerintah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan akan memengaruhi kekuatan jejaring sosial dan akses ke informasi. Pada skala mikro, pemerintah dapat membuat pendampingan-pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan orientasi penggunaan pendapatan. Setelah masyarakat nelayan memiliki kesadaran yang baik dan mampu mengimplementasikannya, peningkatan kapasitas dan pendayaan dapat dilakukan melalui koperasi.

1. Rekayasa Sosial melalui Pendamping Desa (Formal)

Berbagai program pemberdayaan nelayan telah dilakukan, seperti

- 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri,
- 2) Program Keluarga Harapan (PKH),

- 3) program pemerintah lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber modal usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dan lain-lain, dan
- 4) pembentukan pendamping desa (Shalfiah, 2013). Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa program-program tersebut belum berjalan dengan maksimal (Soeprijadi et al., 2013).

Kegagalan program pemberdayaan nelayan disebabkan oleh beberapa hal berikut.

- 1) Solusi cenderung berbentuk satu arah dari pemerintah dan kajian para pakar, tetapi kurang melibatkan partisipasi masyarakat.
- 2) Solusi belum cukup menjangkau akar permasalahan.
- 3) Solusi yang ditawarkan cenderung meminimalisasi aneka variasi yang muncul di lapangan.
- 4) Hasil yang diinginkan sering berupa *improvement* dan bukan *innovation*.
- 5) Program pemberdayaan sering kali berubah sewaktu-waktu.
- 6) Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan cenderung *High Modernism* (Fajri et al., 2021).

Kendati program-program tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal, bukan berarti program tersebut harus ditinggalkan. Salah satu program yang telah berjalan cukup lama adalah program pendamping desa. Pendamping desa menjadi bagian integral dari kebijakan desentralisasi sehingga peran pendamping desa sangat krusial dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Pendamping desa bertugas sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat, menjadi fasilitator musyawarah desa, hingga melakukan penguatan organisasi warga. Selain itu, pendamping desa berperan sebagai fasilitator pembangunan partisipatif, merajut jejaring dan kerja sama desa. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan upaya pemberdayaan nelayan dengan mengoptimalkan pendamping desa.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja pendamping desa adalah rasionya masih belum ideal. Rasio antara jumlah pendamping desa dengan desa harusnya 1:1. Saat ini rasionya adalah 3 hingga 4 desa per pendamping desa. Kondisi tersebut ditambah dengan honor yang sangat terbatas. Rasio tersebut yang menjadi faktor utama belum optimalnya peran pendamping desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi [Kemendesa], 2023). Oleh karena itu, pendamping desa selain ditingkatkan kualitasnya juga harus ditambah kuantitasnya agar menciptakan rasio yang baik.

2. Rekayasa Sosial Melalui Penedukasian di Festival Masyarakat (Nonformal)

Masalah kemiskinan nelayan bersifat multidimensional sehingga untuk mengatasinya diperlukan solusi yang komprehensif dan bukan solusi parsial (Hidayati & Sholichah, 2011). Strategi pemberdayaan ekonomi nelayan harus mencakup kemampuan individu, kemampuan pengambilan keputusan ekonomi, akses dan kontrol atas sumber daya, dan kemampuan organisasi. (Alami & Raharjo, 2017). Penedukasian dan pemberdayaan nelayan harus didasari oleh kearifan lokal. Seperti yang disampaikan sebelumnya, dalam masyarakat nelayan, strata sosial sangat kental dan membentuk suatu pola interaksi.

Masyarakat nelayan rutin melakukan kegiatan ritual secara kolektif (upacara kepercayaan). Maifianti & Raidayani (2021) menyebutkan beberapa contoh dari ritual yang dilakukan secara kolektif, antara lain, adalah ritual slametan di Surabaya (Handayani, 2018), upacara ritual sekaten (Nurdiarti, 2017), komunikasi ritual dalam tarian seblang Banyuwangi (Prihastuti & Laturrahmi, 2017), ruwatan di masyarakat Jawa (Yanti, 2013), *masquerades* di Afrika (Ajala, 2011), ritual seblang oleh orang Using (Saputra, 2014), sedekah laut Kepulauan Seribu (Setiawati, 2019), ritual tumpek wariga di Bali (Sudarsana, 2017), dan ritual tolak bala (Hasbullah et al., 2017).

Upacara ritual tersebut sering kali tidak hanya konsumsi bagi masyarakat wilayah, tetapi juga menjadi kegiatan untuk masyarakat umum dalam bentuk festival. Festival tersebut sering kali merupakan hasil kerja sama perangkat desa dan pemerintah daerah sebagai program pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Pada saat kegiatan festival tersebut, pejabat daerah biasanya diundang untuk memberikan sambutan. Sambutan pada festival tersebut dapat menjadi momentum pengedukasian oleh pemerintah supradesa kepada peserta festival (masyarakat nelayan).

Selain melalui pemerintah supradesa, pengedukasian masyarakat nelayan dapat dilakukan dengan merevitalisasi peran kiai pada ritual tolak bala. Dalam ritual petik laut, kiai dan dalang berperan sebagai tokoh kunci dan mampu mendekati objek persembahan (Ainiyah, 2017). Pemerintah dapat bekerjasama dengan para kiai untuk menciptakan ceramah-ceramah yang ditujukan untuk menciptakan perilaku yang diharapkan. Kegiatan upacara ritual tersebut dapat menjadi waktu yang tepat dalam pengedukasian dikarenakan saat itu tidak ada sekat antara nelayan kecil dengan nelayan pemodal (juragan) (Anwar, 2013).

Dengan pengedukasian yang masif, lambat laun budaya yang diinginkan akan tercipta. Dasar yang menciptakan kegiatan tanpa sekat strata adalah karena setiap individu baik nelayan pemodal maupun nelayan buruh memiliki kesamaan kekhawatiran tentang risiko melaut. Seperti yang disampaikan oleh Durkheim (2008), ritual upacara membawa perubahan baik emosional (batin) maupun praktik (fisik) dalam kehidupan individu maupun kelompok.

G. Pemberdayaan dan Kebijakan Ekonomi Indonesia

Program pemberdayaan nelayan merupakan kebijakan strategis yang harus terus dilakukan dan dievaluasi. Pemberdayaan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan kebijakan keuangan fiskal dan moneter yang baik. Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia

belum dapat menjadikan konsumsi masyarakat Indonesia pada taraf konsumsi yang produktif (Jati, 2015). Besarnya angka konsumsi tanpa diimbangi produktivitas dan ditambah ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap subsidi negara berdampak terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan fiskal yang mampu menjadikan konsumsi masyarakat pada taraf produktif.

Selanjutnya, pemerintah harus menciptakan kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari bank sentral terkait kontrol jumlah moneter untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan moneter adalah pengelolaan uang dan tingkat bunga untuk memengaruhi variabel ekonomi yang penting bagi kesejahteraan ekonomi kita dan suatu instrumen untuk mencapai target kebijakan. Kebijakan moneter yang baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif (Akalpler & Duhok, 2018).

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan mencukupi kebutuhan dan tepat penggunaannya. Hal tersebut adalah keharusan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam jangka panjang berdampak positif terhadap pembangunan (Acarc et al., 2016). Berbagai macam kebijakan pemerintah dari sektor pendidikan, seperti beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dengan tetap menjaga kualitas sumber daya manusia sebagai modal pembangunan berkelanjutan (Bhattacharya, 2012).

Kebijakan ekonomi nasional yang baik juga akan berdampak terhadap berkurangnya keterikatan nelayan kecil dengan patron-klien yang memberatkan. Hal tersebut disampaikan oleh (Chalid & Manji, 2021) yang menyampaikan bahwa dalam kegiatan elektoral pengaruh patron (nelayan juragan) ini dimanfaatkan oleh aktor politik yang berkontestasi memperebutkan kursi kepala daerah. Para nelayan menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat karena menciptakan ketergantungan secara ekonomi, sosial, dan bahkan politik.

1. Prinsip Pemberdayaan Nelayan

Berdasarkan paparan sebelumnya, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat nelayan baik melalui kegiatan formal maupun nonformal harus memuat prinsip-prinsip berikut.

1) Prinsip keberlanjutan:

Sering kali program pemberdayaan yang dilakukan terjebak pada paradigma bahwa harus tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan sering kali diabaikan dalam program pemberdayaan selama ini dan hal tersebut terjadi karena masih kuatnya paradigma proyek dalam setiap aktivitas pemberdayaan. Itu terjadi karena sifat proyek tidak *multiyears*. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali sistem administrasi program pemberdayaan yang dapat berjalan efektif tanpa hambatan administrasi.

2) Prinsip tujuan

Pemberdayaan harus didasari oleh tujuan yang jelas terukur. Dalam pemberdayaan, nelayan harus diposisikan menjadi subyek pembangunan sehingga pendekatan yang dilakukan tepat. Tujuannya adalah membantu nelayan agar dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan dan pelatihan.

3) Prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal

Prinsip ini didasari miskonsepsi yang sering terjadi di masyarakat bahwa pengetahuan modern dianggap jauh lebih baik dan mampu mengatasi setiap persoalan nelayan, padahal nelayan memiliki kearifan lokal dan pengetahuan sendiri. Pengetahuan tersebut sudah diwariskan turun-temurun. Nilai lokal itu menjadi modal sosial yang penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan. Oleh karenanya pemberdayaan nelayan harus memenuhi prinsip pengetahuan dan penguatan nilai lokal.

4) Prinsip ketepatan kelompok sasaran

Pihak pelaksana pemberdayaan sering kali hanya mendatangi elite desa dikarenakan kemudahan komunikasi. Sementara itu,

nelayan miskin yang tidak mudah berkomunikasi malah jarang didatangi. Hal tersebut berdampak pada informasi yang diperoleh menjadi bias dengan kepentingan elite nelayan tersebut. Oleh karenanya banyak program pemberdayaan hanya menyentuh elite nelayan yang sebenarnya tidak perlu diberdayakan.

5) Prinsip kesetaraan gender

Besarnya keterlibatan istri-istri nelayan dalam kegiatan produktif dan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga memberi kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan keluarga (Wawansyah et al., 2012). Konsep pembagian kerja seperti ini tidak serta-merta menjadikan istri nelayan mengabaikan kewajibannya dalam urusan domestik rumah tangga. Dengan kata lain, peran istri menjadi ganda dalam suatu rumah tangga (peran domestik dan reproduktif). Seiring waktu, wanita dituntut beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sekitar sehingga mereka juga memainkan peran sosial di masyarakat. Dalam kondisi sosial seperti itu, sasaran pemberdayaan harus mencakup istri-istri nelayan juga. Sering kali program pemberdayaan hanya berfokus pada nelayan laki-laki.

H. Penutup

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mensyaratkan nelayan kecil yang menangkap ikan di perairan lebih dari 12 mil laut membentuk aksi kolektif dengan bergabung dalam koperasi, asosiasi, atau korporasi. Dalam menghadapi peraturan tersebut nelayan memiliki berbagai macam tantangan dalam perspektif sosial mereka. Tantangan tersebut meliputi rendahnya pendidikan, kapasitas pengelolaan organisasi, individualisme yang berdampak pada preferensi usaha, hubungan patron-klien yang sudah menjerat, dan lain sebagainya. Untuk mengurai permasalahan tersebut, diperlukan pandangan holistik dan kebijakan yang saling mendukung.

Referensi

- Acarc, Oznur, E., Gunalpa, Burak, Cilasunb, & Mumin, S. (2016). An empirical analysis of household education expenditures in Turkey. *International Journal of Educational Development*, 51, 23–35. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S073805931630030X>
- Acheson, J. M. (1981). Anthropology of fishing. *Annual Review of Anthropology*, 10(1), 275–316. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.10.100181.001423>.
- Adawiyah, S. E., Hermanto, A., Yasya, W., Kristanti, R., & Chrisye, M. (2021). Akses terhadap sumber daya alam pada kemiskinan dan ketahanan pangan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 172–185. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664>
- Ainiyah, N. (2017). Ritual petik laut dan keragaman (keragaman dan komunikasi ritual di kalangan nelayan multietnis di Kedungrejo Muncar Banyuwangi). *Jurnal Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, 26(1). https://onsearch.id/Record/IOS6984.article-682?widget=1&repository_id=6984
- Ajala, V. O. (2011). African natural/cultural communication media: A survey of meanings and usage at tradisional ceremonies. *J Communication*, 2(1), 1–12. https://www.researchgate.net/publication/268431629_African_NaturalCultural_Communication_Media_A_Survey_of_Meanings_and_Usage_at_Traditional_Ceremonies
- Akalpler, E., & Duhok, D. (2018). Does monetary policy affect economic growth: Evidence from Malaysia. *Journal of Economic and Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1108/JEAS-03-2017-0013>.
- Alami, A. N., & Raharjo, S. N. I. (2017). Recognizing Indonesian fisherwomen's roles in fishery resource management: Profile, policy, and strategy for economic empowerment. *Journal of the Indian Ocean Region*, 13(1). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19480881.2016.1275329>

- Alimah, S., Mudjiono, & Hastuti, R. D. (2019). Persepsi masyarakat sekitar kawasan puspiptek serpong terhadap potensi dampak sosial rencana pembangunan RDNK. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Energi Nuklir 2019* (211–218). https://www.researchgate.net/publication/349709453_PERSEPSI_MASYARAKAT_SEKITAR_KAWASAN_PUSPIPTEK_SERPONG_TERHADAP_POTENSI_DAMPAK_SOSIAL_RENCANA_PEMBANGUNAN_RDNK
- Andriati, R. (2016). Perubahan budaya kerja nelayan. *Jurnal BioKultur*, 5(1), 61–74. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-bk1ddc6190d9full.pdf>
- Anwar, K. (2013). Makna kultural dan sosial ekonomi tradisi syawalan. *Jurnal Walisongo*, 21(2), 437–465. <https://doi.org/10.21580/ws.21.2.253>
- Arbarini, M., Rifai, A., & Mulyono, S. (2018). Model literasi berbasis entrepreneurship dalam peningkatan ekonomi produktif perempuan istri nelayan tradisional. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2), 170–178. <https://doi.org/10.15294/jnece.v2i2.27505>
- Ashmarita. (2020). Street vendors based on tribal groups in Kendari City, Indonesia. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues*, 1(3), 174–181. <https://doi.org/10.47540/ijsei.v1i3.99>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kontribusi perikanan terhadap produk domestik bruto atas dasar harga berlaku (2015–2019)*. <https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=pdb&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Bengen, D. G. (2001). Ekosistem dan sumber daya pesisir dan laut serta pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam *Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan IPB*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/24548>
- Bhattacharya, R. (2012). Comparative analysis of the extent of free education and average private expenditure on education in India.

- Procedia Social and Behavioral Sciences*, 37, 277 – 295. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812007732>
- Cabral, R. B., Mayorga, J., Clemence, M., Lynham, J., Koeshendrajana, S., Muawanah, U., Nugroho, D., Anna, Z., Mira, Ghofar, A., Zulfainarni, N., Gaines S. D., & Christopher Costello. (2018). Rapid and lasting gains from solving illegal fishing. *Nature Ecology and Evolution*, 2, 650–658. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0499-1>
- Chalid, A., & Manji, T. (2021). Strategi kelompok nelayan dalam mereduksi politik patron klien di Kabupaten Maros. *JlAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 60–73. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3245>
- Charles, A. T. (1992). Fishery conflicts: A unified framework. *Elsevier Marine Policy*, 16(5). 379–393. [https://doi.org/10.1016/0308-597X\(92\)90006-B](https://doi.org/10.1016/0308-597X(92)90006-B)
- Clawson, G., & Frazier, M. (2020, 1 Desember). *2020 Global ocean health index scores*. Ocean Health Index. <https://oceanhealthindex.org/news/2020-scores/>
- Damayanti, H. O. (2018). Strategi pengembangan usaha penangkapan ikan tradisional (studi di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1), 13–26. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6873>
- Denia, M. F., Ghofar, A., & Suryanti, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari di Pantai Sadranan Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. *Management of Aquatic Resources Journal*, 6(4), 449–454. <https://doi.org/10.14710/marj.v6i4.21335>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of qualitative research*. Sage Publication.
- Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2006). *Pembelajaran dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut Berbasis Masyarakat (Vol. 2), kerjasama: COREMAP II dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan*. PT Bina Marina Nusantara.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2018). *DKP Babel dorong KUB nelayan segera bentuk koperasi*. <https://dkp.babelprov.go.id/content/dkp-babel-dorong-kub-nelayan-segera-bentuk-koperasi>
- Doaly, T. (2023, 17 Februari). Outlook KNTI: 80% nelayan kecil berpendidikan di bawah SMP. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/17/outlook-knti-80-nelayan-kecil-berpendidikan-di-bawah-smp/>
- Durkheim, E. (2008). *The elementary forms of religious life*. Dover Publications Inc. https://books.google.com/books/about/The_Elementary_Forms_of_Religious_Life.html?hl=id&id=3j5tyWkEZSYC
- Ermawati, N., & Zuliyati (2015). Dampak sosial dan ekonomi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 (studi kasus Kecamatan Juwana Kabupaten Pati). *Prosiding Seminar Nasional Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat–Unisbank*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/3287>
- Fajri, H., Maani, K. D., Wahyuni, N., & Malau, H. (2021). Collaborative governance sebagai solusi dalam tata kelola pemberdayaan nelayan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 73–88. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2713>
- Ferine, K. F., Ermiaty, C., & Muda, I. (2017). The impact of entrepreneurship and competence on small medium enterprises tangan di atas (TDA) Medan entrepreneurs work performance. *International Journal of Economic Research*, 14(17), 380–393. <https://www.researchgate.net/profile/Iskandar->
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>

- Fitriani, N. N., Marwiyah, S., & Yudianto, E. (2023). Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. *Jurnal Niara*, 15(3), 500–506. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/10722/4530>
- Gumilar, G., & Nuryasin, H. (2022). Efektivitas program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Karawang. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(1), 273–284. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/612>
- Hakim, M. (2019). Fatalisme dan kemiskinan komunitas nelayan. *Jurnal Society*, 7(2), 163–173. <https://media.neliti.com/media/publications/299668-fatalism-and-poverty-in-fishing-communit-0e2ab168.pdf>
- Handayani, S. (2018). Agriculture and ritual: Pola komunikasi ritual slametan musim tanam padi di Ngemplak, Sambikerep, Surabaya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 40–50. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jika/article/view/3047>
- Handayani, L. S. (2023, 21 Maret). Tiga poin dalam PP 11/2023 yang buat nelayan susah tidur. *Republika*. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rrv51d396/tiga-poin-dalam-pp-112023-yang-buat-nelayan-susah-tidur>
- Hasbullah., Toyo., & Pawi, A. A. A. (2017). Ritual tolak bala pada masyarakat Melayu (kajian pada masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Ushuluddin*, 25(1). <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v25i1.2742>
- Helmi, A., & Satria, A. (2012). Strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan ekologis. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 16(1), 68–78. <https://doi.org/10.7454/mssh.v16i1.1494>
- Hidayati, R. A., & Sholichah, M. (2011). Fishermen alleviation poverty model in the North Coastal East Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 147–162. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i2.190>
- Imron, M. (2011). Nelayan dan kemiskinan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 63–82.

- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. *IPCC Sixth Assessment Report*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
- Jati, W. R. (2015). Bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi: Jendela peluang atau jendela bencana di Indonesia?. *Jurnal Populasi*, 23(1), 1–19. <https://doi.org/10.22146/Jp.8559>.
- Kadfak, A., & Linke, S. (2021). Labour implications of the EU'S illegal, unreported and unregulated (IUU) policy in Thailand. *Marine Policy*, 127(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104445>
- Kamim, A. B. M., Amal, I., Khandiq, M. R. (2018). Pemerintah sebagai agen perubahan sosial yang direncanakan: Studi atas pembangunan kemaritiman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dialektika Masyarakat*, 2(2), 95–119. <https://www.neliti.com/id/publications/368792/pemerintah-sebagai-agen-perubahan-sosial-yang-direncanakan-studi-atas-pembanguna>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Gus Halim: Keseimbangan rasio Pld dan desa untuk efektifitas pendampingan desa*. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4693/gus-halim-keseimbangan-rasio-pld-dan-desa-untuk-efektifitas-pendampingan-desa>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020, 24 November). *Peringkat kedua produsen hasil perikanan, Pemerintah Indonesia upayakan peningkatan ekspor*. Diakses pada 29 Maret 2023, dari <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/25535-peringkat-kedua-produsen-hasil-perikanan-pemerintah-indonesia-upayakan-peningkatan-ekspor>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Penangkapan ikan terukur berbasis kuotautamakan nelayan kecil*. <https://kkp.go.id/djpt/artikel/38384-penangkapan-ikan-terukur-berbasis-kuota-utamakan-nelayan-kecil>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Jumlah nelayan budidaya di Indonesia (2012-2020)*. <https://Statistik.Kkp.Go.Id/Home.Php?M=Nelayan&I=6#Panel-Footer>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Ringkasan eksekutif rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim Badan Perencanaan*

- Pembangunan Nasional (Bappenas)*. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/luncurkan-dokumen-kebijakan-pembangunan-berketahanan-iklim>
- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. (2023, 13 Februari). *Outlook KNTI 2023: Akselerasi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional di Indonesia*. <https://knti.or.id/outlook-knti-2023/>
- Kurniawati, A. (2017). Peran istri nelayan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. *Jurnal Saintek Maritim*, 17(1), 77–88. <https://jurnal.unimar-amni.ac.id/index.php/JSTM/article/view/160>
- Kusnadi. (2015). *Pembangunan wilayah pesisir terpadu: Strategi mengatasi kemiskinan nelayan*. Yogyakarta Graha Ilmu. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79135>
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan masyarakat Indonesia: Suatu problematik filsafat kebudayaan*. Grasindo. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79135>
- Lubis, E., Pane, A. B., Muningsar, R., & Hamzah, A. (2012). Besaran kerugian nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. *Maspari Journal*, 4(2), 159–167. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/maspari/article/view/1382>
- Maifianti, K. C., & Raidayani. (2021). Etnografi komunikasi kanuri laot masyarakat nelayan Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal AGRISEP*, 20(1), 95–192. <https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.1.95-102>
- Manggopa, N., Andaki, J. A., Rarung, L. K., Suhaeni, S., & Rantung, S. V. (2022). Persepsi anak nelayan terhadap usaha nelayan tradisional di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 10(1), 185–193. <https://ejournal.unsri.ac.id/v3/index.php/akulturas/article/download/39981/35930/86134>
- Masyhuri. (2017). Pembiayaan nonformal usaha perikanan tangkap: Kasus Muncar dan Bitung. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*,

- 22(2), 135–148. <https://www.neliti.com/publications/200982/pembiayaan-nonformal-usaha-perikanan-tangkap-kasus-muncar-dan-bitung>
- Media Indonesia. (2022, 1 Februari). *Menteri Desa minta BUMDes tingkatkan perekonomian masyarakat setempat*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/468572/menteri-desa-minta-bumdes-tingkatkan-perekonomian-masyarakat-setempat>
- Muflikhati, I., Hartoyo, H., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2009). Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga: Kasus di wilayah pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.1>.
- Nadjib, M. (2013). Agama, etika dan etos kerja dalam aktivitas ekonomi masyarakat nelayan Jawa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 19–32. <https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.19-32>.
- Nainggolan, H. L., Aritonang, J., Ginting, A., Sihotang, M. R., & Gea, M. A. P. (2021). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan nelayan tradisional di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 237–256. <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-DAN-STRATEGI-PENINGKATAN-PENDAPATAN-DI-Nainggolan-Aritonang/ceb516152a81a6b47be452da542b3218a-bef322a>
- Nawawi, A. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 103–109. https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/download/6370/5226
- Northrop, E., Konar, M., Frost, N., & Hollaway, E. (2020). *A sustainable and equitable blue recovery to the Covid-19 crisis*. World Resources Institute. https://oceanpanel.org/wp-content/uploads/2022/05/20_HLP_Report_COVID_Blue_Recovery.pdf
- Notoadmojo, S. (2003). *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Penerbit Rineka Cipta. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=33283>
- Nurdiarti, R. P. (2017). Representasi pangan dalam komunikasi ritual (Kajian komunikasi ritual dalam perayaan sekaten di Yogyakarta)

- 2015-2016). *Jurnal CHANNEL*, 5(1), 120–130. <http://journal.uad.ac.id/index.php/CHANNEL/article/view/6358>
- Nye, J. A., Link, J. S., Hare, J. A., & Overholtz, W. J. (2009). Changing spatial distribution of fish stocks in relation to climate and population size on the northeast united states continental shelf. *Marine Ecology Progress*, 393(1), 111–129. <https://doi.org/10.3354/meps08220>
- Pangidunan, E., Manoppo, V. E. N., Kotambunan. O. V., Sondakh, S. J., Longdong, F. V., & Aling, D. R. R. (2023). Kontribusi pekerjaan sampingan nelayan pancing ulur terhadap perekonomian keluarga di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11(1), 213–221. <https://www.researchgate.net/publication/334674176>
- Pauli, G. (2011). The blue economy 10 years - 100 innovations 100 million jobs this blue paper provides a brief overview on the opportunitie s a blue economy. *Japan SPOTLIGHT*, 175. https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th_cover04.pdf
- Pebrianto, F. (2020, 8 September). Kontribusi sektor kelautan dan perikanan ke PDB baru 3,7 persen. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1383928/kontribusi-sektor-kelautan-dan-perikanan-ke-pdb-baru-37-persen>
- Perry, A. L., Low, P. J., Ellis, J. R., & Reynolds. J. D. (2005). Climate change and distribution shifts in marine fishes. *Science*, 308(1), 1912–1915. <https://doi.org/10.1126/science.1111322>
- Pinem, E. Y., Widiono, S. W., & Irnad, I. (2019). Kemiskinan struktural komunitas nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 91–112. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.91-112>
- Pinsky, M. L., Worm, B., Fogarty, M. J., Sarmiento, J. L., & Levin. S. A. (2013). Marine taxa track local climate velocities. *Science*, 341(1), 1239–1242. <https://doi.org/10.1126/science.1239352>
- Pitakasari, A. R. (2011, 7 Januari). Nelayan tangkap Indonesia kian berkurang, apa sebabnya. *Republika*. <https://ekonomi.republika>

co.id/berita/156982/nelayan-tangkap-indonesia-kian-berkurang-apa-sebabnya.

- Popkin, S. (1979). *The rational peasant: The political economy of rural society in Vietnam*. University of California Press. <https://www.jstor.org/stable/4225034>
- Prihastuti, D., & Laturrakhmi, Y. F. (2017). Sebuah studi tentang komunikasi ritual dalam tarian seblang Banyuwangi. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 1(2), 72–79. <https://jsbn.uib.ac.id/index.php/sbn/article/view/26>
- Primiyastanto, M., Dewi, R.P., & Susilo, E. (2010). Perilaku perusakan lingkungan masyarakat pesisir dalam perspektif Islam environment destruction behavior of the coastal people in Islamic perspective. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari*, 1(1). <https://jpal.uib.ac.id/index.php/jpal/article/view/99/99>
- Pryanka, A. (2018, 15 November). Guru besar IPB sampaikan penyebab nelayan indonesia miskin. *Ekonomi Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pi7qdl383/guru-besar-ipb-sampaikan-penyebab-nelayan-indonesia-miskin>
- Purwoko, A., Sukiyono, K., & Priyono, B. S. (2011). Probabilitas terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga. *Jurnal Sosiohumaniora*, 13(1), 58–75. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5462>.
- Rahardjo, M. D. (1999). *Masyarakat madani: Agama, kelas menengah, dan perubahan sosial*. LP3ES. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=2712&lokasi=lokal>
- Rahim, A. (2018). The empowerment strategy of the traditional fisherman's wives in the coastal area of Barru Regency, South Sulawesi. *Journal of Socioeconomics and Development*, 1(1), 1–6. <http://eprints.unm.ac.id/18251/>
- Ramadhan, F. C., Sirri, A., & Riezdita, A. (2022). Konsepsi model pembiayaan perikanan dan kelautan sebagai alternatif peningkata ekonomi kelautan indonesia. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 37–48. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/JIB/article/download/385/285>

- Rasmianto. (2009). Interrelasi kiai, penghulu dan pemangku adat dalam tradisi Islam Wetu Telu di Lombok. *El-Harakah*, 11(2), 138–154. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/429>
- Ratnawati, S., & Sutopo, H. H. (2014). The development of model empowerment poor society in coastal area through net marketing. *Academic Research International*, 5(1), 237–243. https://www.academia.edu/59084605/Has_Empowerment_Program_Been_Appropriate_for_the_Need_of_Fisheries_Business_Player_Case_Study_in_Lampung_Province_Indonesia
- Retnowati H., Sukmawati, A., & Nurani, T. W. (2014). Strategi peningkatan kinerja nelayan dalam rantai pasok ikan layur melalui pengembangan modal insani di Pelabuhanratu. *Manajemen IKM*, 9(2), 140–149. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/8742>
- Rivera, V. S., Cordero, P. M., Rojas, D. C., & O’Riordan, B. (2017). Institutions and collective action in a Costa Rican small-scale fisheries cooperative: The case of coopetarcoles r.l. *Maritime Studies*, 16(22), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s40152-017-0077-1>
- Rosita, Kasim, S.S., & Upe, A. (2021). Dampak konflik sosial terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Desa Gunung Jaya dan Desa Sampuabalo Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton. *Jurnal Societal*, 8(1), 9–17. <https://www.researchgate.net/profile/Syaifudin-Kasim/publication/359849553>
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Jurnal Sosio Informa*, 3(3).
- Sabian, U. (2007). *Anatomi konflik dan solidaritas masyarakat nelayan: Sebuah penelitian sosiologis*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Saputra, H. S. P. (2014). Wasiat leluhur: Respon orang Using terhadap sakralitas dan fungsi sosial ritual seblang. *Jurnal Makara Hubs-Asis*, 18(1), 51–65. <https://doi.org/10.7454/mmsh.v18i1.3461>.
- Sari, D., Nugroho, F., & Warningsih, T. (2020). The influence of “Program Keluarga Harapan (PKH)” on the income level of

- fishers at Bagan Hulu, Bangko sub-regency, Rokan Hilir regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 251–258.
- Satori, D. & Komariah, A. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit Alfabeta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=22940>
- Satria, A. (2001). *Dinamika modernisasi perikanan: Formasi sosial dan mobilitas nelayan*. Humaniora Press. <https://batupusaka.bantenprov.go.id/koleksi/monograf/sosial/OTE0NTM-W5na2FiLnBlcnB1c25hcy5nby5pZC9pbmxc2xpdGUzLw>
- Satria, A. (2002). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Pustaka Cidesindo. <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/123456789/82480/1/PSMP.pdf>
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *The American Political Science Review*, 66(1), 91–113. <https://www.jstor.org/stable/1959280>
- Setiawati, R. (2019). Makna komunikasi ritual sedekah laut sebagai pelestarian nilai-nilai budaya maritim masyarakat Desa Pulau Kelapa Kepulauan Seribu. *Prosiding Teknologi Terapan Inovasi dan Rekayasa*, 2(1), 436–446. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/snt2bkl/article/view/9873>
- Shalfiah, R. (2017). Peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 1(3), 975–984. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL%20dita%20\(08-26-13-12-59-15\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/08/JURNAL%20dita%20(08-26-13-12-59-15).pdf)
- Silooy, M. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan absolut masyarakat pesisir (nelayan) di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Cita Ekonomika: Jurnal Ekonom*, 11(1), 79–84. <https://media.neliti.com/media/publications/328178-analisis-faktor-faktor-yang-memengaruhi-043f2aff.pdf>
- Sirojuzilam, H. S., & Muda, I. (2017). Effect of private collaborative as a moderation of success of agropolitan program. *International Journal of Economic Research*, 14(2), 304–315. <https://www.cceol.com/search/article-detail?id=620056>

- Soeprijadi, L., Yuli, E., Susilo, E., & Rudianto, R. (2013). Fishermen community economic empowerment through joint development business group in Cirebon City. *International Journal of Marine Science*, 3(35), 278–284. <https://doi.org/10.5376/IJMS.2013.03.0035>
- Suarjaya, I. K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Sangeh Kecamatan Abiansental Kabupaten Badung. *Jurnal Widyanata*, 18(1), 30–37. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/602>
- Sudarsana, I.K. (2017). Konsep pelestarian lingkungan dalam upacara tumpek wariga sebagai media pendidikan bagi masyarakat Hindu Bali. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 2(1), 1–7. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/1934>
- Suhartanti, R., Suharso, P., & Ani, H.M. (2022). Gaya hidup masyarakat nelayan Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 16(1), 27–32. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.22459>
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Penerbit Rafika Aditama. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1906>
- Sumantika, A., & Ardiyanto, F. (2018). Penurunan bunga KUR dan dampak negatifnya terhadap loyalitas nasabah UMKM bank non penyalur KUR pada sektor mikro kecil. *Jurnal Modus*, 30(2), 110–121. <https://doi.org/10.24002/modus.v30i2.1699>
- Suryadi, A. M., & Sufi. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan (Studi di kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Negotium*, 2(2), 118–140. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi kemiskinan dan strategi penanganannya*. Intrans Publishing. https://fia.ub.ac.id/katalog/index.php?p=show_detail&id=5635&keywords=

- Taremwa, N. K., & Lopoyetum, S. K. (2015). The role of academic and training institutions in cooperatives development. *East African Journal of Science and Technology*, 5(1), 196–207. <http://ejst.unilak.ac.rw:8090/index.php/east/article/download/92/75>
- Tubaka, N. (2022, 29 September). Koral: Kebijakan penangkapan ikan terukur memperburuk kehidupan nelayan. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2022/09/29/koral-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-memperburuk-kehidupan-nelayan/>
- Turkington, T., Timbal, B., & Rahmat, R. (2018). The impact of global warming on sea surface temperature based El Niño southern oscillation monitoring indices. *International Journal of Climatology*, 39(1), 1092–1103. <https://doi.org/10.1002/joc.5864>
- Utami, K. D. (2022, 31 Agustus). Penangkapan ikan terukur dinilai merugikan nelayan kecil di Pantura. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/08/31/penangkapan-ikan-terukur-dinilai-merugikan-nelayan-kecil>
- Valentina, R. A. (2018). Kebijakan bagi nelayan tradisional. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 184–197. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18814>
- Warren, C., & Steenbergen, D. J. (2021). Fisheries decline, local livelihoods and conflicted governance: An Indonesian case. *Ocean & Coastal Management*, 202(1), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105498>
- Wasiaturrahma, Sulisttyowati, C., Heryati, D., & Ajija, S. R. (2020). Improving the cooperative performance through financial management assistance in Koperasi 64 Surabaya. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 256–267. <https://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/1415#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20kontribusi,tangga%20didominasi%20oleh%20wanita%20nelayan.>
- Wawansyah, H., Gumilar, I., & Taofiqurohman, A. (2012). Kontribusi ekonomi produktif wanita nelayan terhadap pendapatan keluarga nelayan. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 3(3), 95–106. <https://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/1415#:~:text=Hasil%20>

penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20kontribusi,tangga%20 didominasi%20oleh%20wanita%20nelayan.

- Yanti, F. (2013). Pola komunikasi Islam terhadap tradisi heterodoks (studi kasus tradisi ruwatan). *Jurnal Analisis*, 13(1), 201–218. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/686>
- Yohnson. (2004). Peran universitas di Surabaya dalam meningkatkan jumlah keluarga mapan di Surabaya (Seri penelitian keuangan keluarga. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 6(1), 54–71. <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/15649>
- Yuniarti, D., & Sukarniati, L. (2021). Coping strategy and fisher's income: An empirical study. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 16(1), 1–11.
- Yusnita, T., Agung, S. S., & Saleh, A. (2015). Peranan opinion leader dalam kelompok nelayan pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1), 160–168. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/view/13557>
- Zaini, M. (2021). *Kebijakan penangkapan terukur dalam pengelolaan perikanan tangkap*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-KKP. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerapan-kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-dimulai-2024>
- Zulfa, D. N. A., & Susanti, R. (2023). Kehidupan nelayan tradisional di perkotaan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2712–2721. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/11492>
- Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2), 89–101. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3076242>